

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN INDONESIA**

Ahmad Iqbal, Sukamto Satoto, Syamsir
Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Jambi

Author's Email Correspondence : iqbal.batanghari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undang-undangan Indonesia. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan sengketa pemilihan Kepala Daerah dalam perspektif peraturan perundang Undang-undangan Indonesia, yang kedua bagaimana penyelesaian sengketa Kepala Daerah melalui *quasi judicial* oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masing-masing jenis lembaga peradilan dalam perspektif peraturan perundang Undang-undangan Indonesia. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia ada tiga jenis pelanggaran menurut undang-undang, yakni (1) Pelanggaran administrasi Pemilu (2) Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana Pemilu) (3) Pelanggaran Kode etik Pemilu dan dua jenis Sengketa yakni (1) Sengketa proses pemilu (2) Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya. Dalam pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Untuk tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya. Dalam pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Untuk tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan para anggota Bawaslu harus diberikan *upgrade knowlagde* tentang hukum positif sehingga mereka dalam membuat atau melahirkan suatu keputusan yang tepat dan adil.

Kata Kunci : Kewenangan Bawaslu, Sengketa Pilkada

AUTHORITY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN HANDLING OF BREACHS AND SETTLEMENT REGIONAL HEAD ELECTION DISPUTE IN PERSPECTIVE INDONESIAN REGULATIONS

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the General Election Supervisory Agency in Handling Violations and Settlement of Regional Head Election disputes in the Perspective of Indonesian Laws and Regulations. Therefore, the authors make this thesis problem in two things, first how the General Election Supervisory Agency in handling violations and resolving the problem of Regional Head election disputes in the perspective of Indonesian legislation. To solve this problem, the author uses a normative juridical research method by collecting and examining the applicable laws and regulations relevant to the issues discussed, especially those related to the authority of Bawaslu and also in this research assisted by a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach) based on the theories used by experts. The results of the research obtained based on the analysis and discussion found that there are legal problems, namely in the implementation of Pemilu in Indonesia, there are three types of violations according to the law, namely (1) Election criminal offenses (election crimes). (2). Disputes in the stages / process of an election, violations of election administration, violations of the code of ethics. (3). Election result disputes and other legal disputes. In violation of election administration, Bawaslu wants it to be given the authority to supervise and simultaneously impose administrative sanctions. Election crimes are classified into criminal offenses and crimes. In connection with the results of this study, the author can provide recommendations, namely that the authors expect Bawaslu members to be given upgraded knowledge about positive law so that they make or produce a right and fair decision.

Key Word : The Authority of Bawaslu, Election Dispute